

---

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR ROB DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG

Roofy Reizkapuni<sup>1</sup> dan Mardwi Rahdriawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email: roofyyeah@yahoo.com

**Abstrak:** Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu kelurahan di Kota Semarang yang rawan terhadap banjir rob karena posisinya yang berseberangan langsung dengan Laut Jawa. Pihak yang paling dirugikan dari masalah banjir rob ini adalah masyarakat sehingga diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk mengatasinya. Di Kelurahan Tanjung Mas ini terdapat program untuk pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi penanggulangan banjir rob yang diwadahi oleh PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2003. Kegiatan penanggulangan banjir rob di kelurahan ini antara lain peninggian jalan, pembuatan talud, dan perbaikan drainase. Upaya-upaya tersebut cukup membantu masyarakat terhindar dari banjir rob untuk beberapa waktu. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikaji mengenai proses pemberdayaan masyarakat, permasalahan yang terdapat didalamnya, peran serta masyarakat, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Untuk peningkatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengeliminir faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan dari sisi kelembagaan dan kapasitas masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan untuk beberapa stakeholders terkait seperti fasilitator, BKM, UP, KSM dan masyarakat Kelurahan Tanjung Mas. Rekomendasi berupa penerapan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang telah dikaji serta memfokuskan penanganan permasalahan banjir rob dengan membedakannya dengan permasalahan infrastruktur lainnya supaya penanganannya lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau seluruh wilayah kelurahan.

**Kata kunci :** *Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Banjir Rob, Fasilitator.*

**Abstract:** Tanjung Mas Village is one of the villages in Semarang City which is really prone of tidal flood because of its position that connect directly to the Java Sea. Parties that bear loss the most because of this tidal flood impacts is society, so that is why public participation is also needed to address them. Tanjung Mas Village has a community empowerment program that facilitating tidal flood prevention housed by PNPM Mandiri Perkotaan since 2003. Tidal flood prevention activities through this program are such as elevating roads, making talud, and drainage improvements. These efforts help society avoid tidal flood for a while. The purpose of this study is to assess about community empowerment in respons to tidal flood prevention in Tanjung Mas Village. This research is using qualitative methods. From the results of the analysis, it can be assessed about community empowerment process, problems, public participation, and improvement efforts of community empowerment in respons to tidal flood prevention in Tanjung Mas Village. The improvement efforts from this research are implementation of empowerment approach, eliminate the inhibiting factors in empowering process both for institutional and community capacity, and application of community empowerment principles. Recommendation from this research is devoted to some relevant stakeholders such as facilitators, BKM, UP, KSM, and community. The recommendations are implementation of community empowerment improvement

*efforts that has been assessed and focus in preventing tidal flood issues by sets it aart from other infrastructure issues in order to handle more right on target and can reach all areas of the village.*

**Keywords:** *Community Empowerment, Tidal Flood Prevention. Facilitator*

## PENDAHULUAN

Salah satu dari kelurahan di Kecamatan Semarang Utara yang sangat rentan terhadap banjir rob adalah Kelurahan Tanjung Mas. Menurut Kodoatie (2002), Banjir rob terjadi ketika air pasang menggenang akibat adanya kontak antara laut dengan daratan melalui sungai atau saluran yang bermuara ke pantai. Apabila permasalahan banjir rob ini tidak ditangani dapat menimbulkan banyak kerugian yang harus ditanggung masyarakat. Paradigma penanggulangan bencana banjir rob biasanya hanya memfokuskan kepada aspek teknis, padahal partisipasi dari masyarakat juga diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan banjir rob ini.

Di Kelurahan Tanjung Mas ini karakteristik masyarakatnya tergolong berpenghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari kondisi permukimannya yang kumuh. Menurut Kusnanto (2011), kondisi ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan kemampuan untuk beradaptasi atau mengatasi masalah, sehingga rendahnya tingkat ekonomi masyarakat tersebut menyebabkan tidak berdayanya masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungannya. Maka dari itu diperlukan adanya upaya meningkatkan *power* masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberdayaan.

Di Kelurahan Tanjung Mas terdapat program untuk pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi penanggulangan banjir rob yang diwadahi oleh PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2003. Dalam lingkup kelurahan, program ini dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Untuk menjalankan berbagai kegiatan pembangunan fisik, sumber dana didapatkan melalui bantuan dana dari Kementrian PU dan swadaya masyarakat dengan proporsi sharing sebesar 70:30 persen. Kegiatan penanggulangan banjir rob yang telah dilakukan diantaranya peninggian jalan, pembuatan talud, dan perbaikan drainase.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama sepuluh tahun ini masih ditemui beberapa kendala antara lain *channeling* BKM dengan pihak lain untuk perolehan dana masih minim, BKM baru mampu mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan arahan PNPM, tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Tanjung Mas masih rendah sehingga berpengaruh dalam transfer pengetahuan, program untuk penanggulangan rob masih kurang tepat sasaran karena harus dilakukan tiap tiga tahun sekali, dsb. Dari berbagai permasalahan tersebut dapat menyebabkan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan rob kurang optimal. Maka dari itu pertanyaan penelitian yang dapat diangkat adalah: *"Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas?"*. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Mengidentifikasi kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas;
- Mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas melalui pemberdayaan masyarakat;
- Menganalisis proses pemberdayaan di Kelurahan Tanjung Mas;
- Menganalisis permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas;
- Menganalisis partisipasi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas dalam penanggulangan banjir rob;
- Menganalisis peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas.

## KAJIAN LITERATUR

### Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife (1997) dalam Zubaedi (2007), pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kekuasaan dan kemampuan kelompok yang rentan dan lemah. Konsep dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengimbuu suatu kelompok masyarakat supaya mampu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan bersama. Konsep dari pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa model, salah satunya Yoo, et al (2009) membagi model pemberdayaan masyarakat kedalam enam langkah dalam teorinya yaitu "*The 6-Step Model for Community Empowerment*" yaitu: masuk ke masyarakat, identifikasi permasalahan, prioritas masalah, pengembangan strategi, implementasi, dan transisi.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada hasil dari perubahan sosial yakni masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Pelaksanaan proses untuk pencapaian tersebut membutuhkan pendekatan dalam pelaksanaannya. Suharto (2010) merangkum strategi pemberdayaan dalam 5P, yakni:

- a. Pemungkinan: menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara maksimal
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat dari adanya segala jenis diskriminasi dan dominasi yang merugikan mereka.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan (*transfer of knowledge*) dan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan peranan kehidupannya.
- e. Pemeliharaan: pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif untuk memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan. Seperti yang telah dirangkum oleh Suharto (2010), prinsip pemberdayaan menurut beberapa penulis seperti Solomon, et al (1976) diantaranya pemberdayaan merupakan suatu proses kolaboratif, maka dari itu masyarakat dan pekerja sosial harus bekerjasama sebagai partner, proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan, masyarakat harus memandang diri mereka sendiri sebagai pribadi yang mampu mempengaruhi perubahan, masyarakat harus turut andil berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, dan mereka harus mampu merumuskan tujuan, cara dan hasil, tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan, pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif, proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif, dan selalu memiliki solusi yang beragam.

### Kapasitas Masyarakat

Bicara mengenai pemberdayaan masyarakat, terdapat dua kunci kontekstual yang sangat berpengaruh terhadap pengamatan pemberdayaan yaitu konteks masyarakat dan konteks organisasi (Lawson and Kearns, 2009). Kemampuan masyarakat dan organisasi untuk mengelola urusan mereka dan mendorong pada perubahan positif biasa disebut dengan kapasitas masyarakat. Mattesich, et al (1997) mengemukakan beberapa hal lain yang termasuk dalam karakteristik masyarakat, diantaranya adalah

- a. Kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah
- b. Motivasi dalam masyarakat
- c. Area geografis yang kecil
- d. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi
- e. Kohesi sosial

- f. Kemampuan untuk berdiskusi, mencapai consensus, dan bekerjasama
- g. Kepemimpinan
- h. Pengalaman

### Kelembagaan

Menurut Djogo, dkk (2003) bahwa kelembagaan tidak sama dengan organisasi (memiliki arti hanya sebagai wadah saja), tetapi juga termasuk aturan main, etika, kode etik, sikap, dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi maupun sistem. Unsur-unsur kelembagaan yang terkait dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut (Djogo, dkk, 2003)

- a. Institusi sebagai dasar dalam membangun tingkah laku sosial masyarakat;
- b. Norma dalam masyarakat;
- c. Peraturan dan penegakan aturan atau hukum;
- d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak, dan kewajiban anggota;
- e. Kode etik;
- f. Kontrak;
- g. Organisasi; dan
- h. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bagian penting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pengertian partisipasi masyarakat menurut PBB (dalam Dritasto, 2005) adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberikan kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil-hasil pembangunan secara adil. Cohen dan Uphoff (1979) membagi partisipasi kedalam empat tahapan, antara lain:

- a. *Participation in decision making*: dalam keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan untuk membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang dapat dilaksanakan
- b. *Participation in implementation*: partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran,

bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan

- c. *Participation in benefits*: partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai
- d. *Participation in evaluation: feedback* dari masyarakat demi perbaikan pelaksanaan proyek yang akan datang

### Penanggulangan Banjir Rob

Definisi banjir rob menurut Kodoatie (2002) adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut pasang yang menggenangi daratan. Banjir rob akan semakin parah dengan adanya genangan air hujan (*run off*), dan banjir lokal akibat saluran drainase yang kurang terawat dan kurangnya ruang terbuka hijau. Penanggulangan banjir menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002) terbagi dalam dua tinjauan, yaitu tinjauan aspek teknis dan tinjauan aspek non-teknis. Tinjauan penanggulangan banjir berdasarkan aspek teknis membahas mengenai tiga hal, yakni sungai, sistem drainase, dan tata guna lahan. Sedangkan yang dibahas dalam tinjauan aspek non-teknis adalah upaya untuk menanggulangi kondisi lingkungan yang terancam disertai upaya peningkatan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam lingkup sosial dan budaya.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan studi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada pendekatan kualitatif ini strategi penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus karena penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana" yang bersifat eksploratif. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode non-probability sampling dengan variasi maksimal karena informasi akan digali dari pihak internal dan eksternal program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan survey primer berupa wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan serta survey sekunder berupa kajian literatur, telaah dokumen dan survey istansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Fisik Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas merupakan dataran rendah yang terletak di pesisir pantai dengan karakteristik hidrologi aquiver produktivitas sedang hingga tinggi yang potensial menimbulkan banjir rob. Kondisi banjir rob di kelurahan ini memiliki ketinggian genangan mulai dari 30 cm - 1 m dengan genangan terparah pada RW XII hingga RW XIV karena letaknya yang paling dekat dengan laut, namun secara keseluruhan kelurahan ini terendam banjir rob disemua wilayahnya ketika air pasang. Diperkirakan genangan rob di kelurahan ini bertambah parah karena terjadi amblesan tanah sekitar 13 cm tiap tahunnya dan air pasang yang semakin tinggi debit airnya. Dampak banjir rob dirasakan masyarakat berupa kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.



Sumber: Hasil Observasi Penyusun, 2013.

**GAMBAR 1**

**KONDISI BANJIR ROB DI KELURAHAN TANJUNG MAS**

### Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas

Kondisi sosial masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan diketahui mayoritas masyarakat Kelurahan Tanjung Mas mengenyam pendidikan hingga tamat SMA, namun tidak sedikit pula yang hanya tamat SD bahkan tidak melanjutkan sekolah akibat kekurangan biaya dan ketidakmampuan orang tua. Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas rata-rata berpenghasilan rendah dengan mata pencaharian mayoritas adalah buruh industri, buruh bangunan, dan nelayan

karena letaknya yang bersebelahan dengan laut.

### Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir Rob di Kelurahan Tanjung Mas

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas berawal pada tahun 2003 sejak masuknya program PNPM Mandiri perkotaan di Kota Semarang. PNPM-MP menggunakan perencanaan yang bersifat partisipatif (*participatory planning*) dalam penerapannya sehingga masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pelaksanaan program ini dilakukan secara holistik dan terpadu pada tingkat kawasan atau lingkungan yang sebenarnya merupakan aktualisasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan melakukan pendekatan tridaya, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penanggulangan banjir rob merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam aspek lingkungan. Program penanggulangan banjir rob dilakukan dengan memetakan masalah terkait banjir rob dan apa saja akar penyebab permasalahannya terlebih dahulu, setelah itu masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa indikasi persoalan dan diprioritaskan, keterangannya yaitu persoalan kondisi jalan dengan level prioritas I, kondisi saluran drainase level prioritas II, dan kondisi talud pada level prioritas III. Untuk pengimplementasiannya, dikarenakan seluruh kelurahan terendam banjir rob, maka dicari wilayah yang paling mendesak kebutuhannya. Sejauh ini program yang telah diimplementasikan dari tahun 2010-2012 untuk penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas diantaranya pembuatan talud, peninggian jalan, dan pembangunan drainase

### Proses Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat  
Awal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pertama masuk ke masyarakat dengan melakukan FGD untuk

pembangunan kesadaran kritis masyarakat, selanjutnya melakukan refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya untuk identifikasi dan prioritas masalah serta menentukan pengembangan strategi dari hal tersebut. Tahap selanjutnya adalah transisi peran fasilitator kepada masyarakat dengan FGD untuk sosialisasi kelembagaan mengenai nilai-nilai kepemimpinan, lalu pembentukan kelembagaan BKM beserta unit-unit pengelolanya. Secara umum proses awal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas telah sesuai dengan model pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada umumnya seperti menurut Yoo, et al (2010), perbedaan hanya terdapat pada step 5 dan step 6 karena tahap transisi peran fasilitator kepada masyarakat terlebih dahulu dilakukan sebelum tahap implementasi program.

#### b. Peran Stakeholders

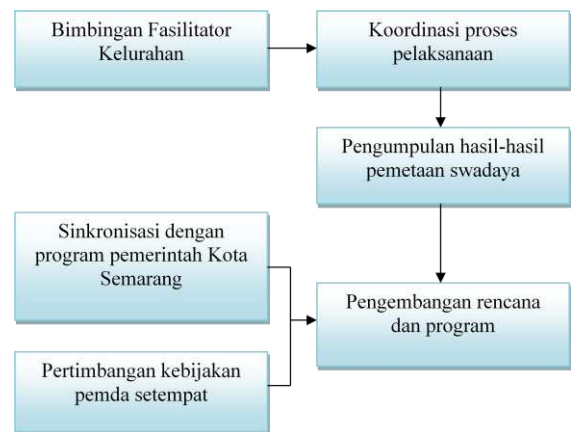
Peran stakeholders terkait program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas antara lain:

- Korkot: melakukan koordinasi antara BKM dengan pemerintah Kota Semarang serta memfasilitasi para relawan. Korkot terikat langsung dengan PNPM MP Jawa Tengah untuk meng-handle pemberdayaan masyarakat satu Kota Semarang
- Fasilitator kelurahan: Fasilitasi, mediasi, dan advokasi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas. Fasilitator memegang peran penting sebagai pembimbing masyarakat Kelurahan Tanjung Mas
- BKM: lembaga kepercayaan masyarakat Kelurahan Tanjung Mas yang mengkoordinir segala kegiatan pemberdayaan masyarakat
- UP-UP: memberikan informasi dan laporan perkembangan masing-masing kegiatan yang menjadi tugas pokoknya
- KSM: untuk akses pada kegiatan ekonomi perannya adalah membentuk kelompok untuk perguliran ekonomi (simpan pinjam masyarakat dengan BKM), sedangkan untuk akses sosial dan lingkungan KSM

membentuk kepanitiaan untuk pelaksanaan program

#### c. Penyusunan Program

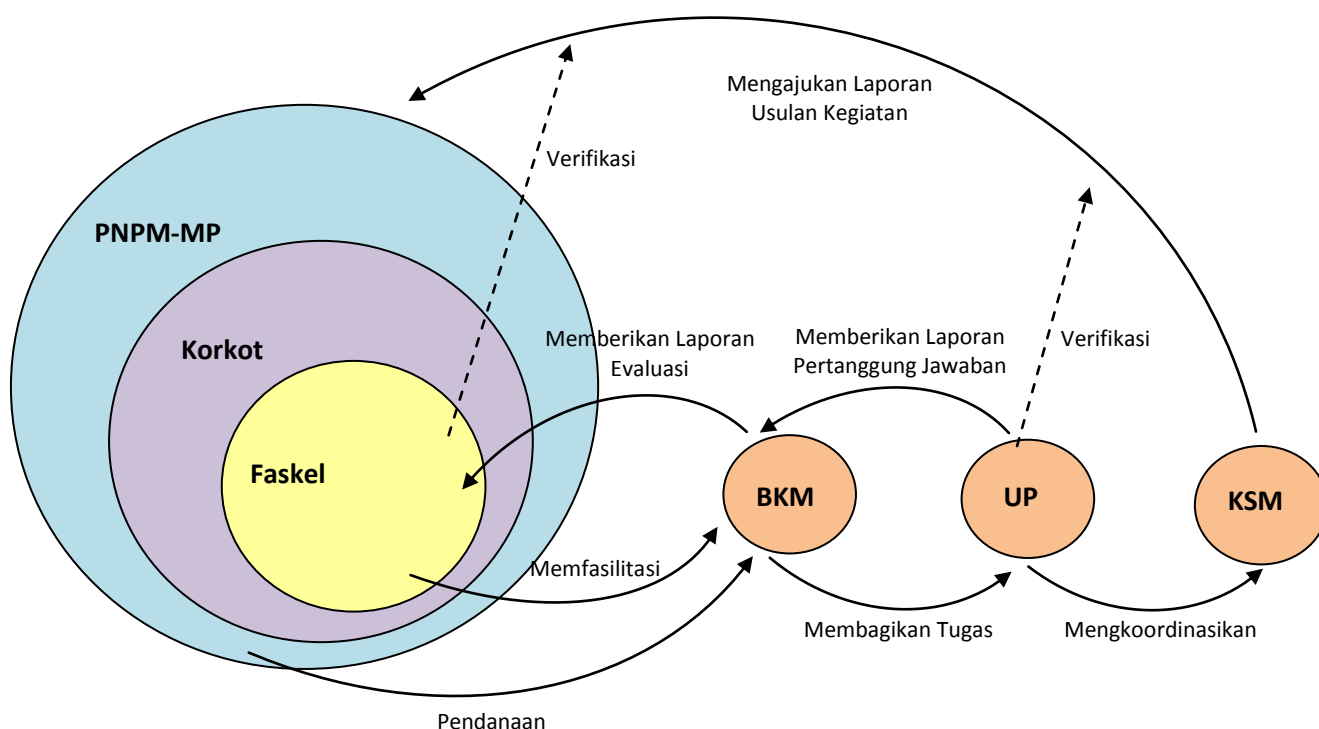
Perencanaan program dilakukan pada tiga kegiatan yaitu pemetaan swadaya, penyusunan PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan), dan Renta Pronangkis. Berikut adalah alur penyusunannya:



Sumber: Hasil Observasi Penyusun, 2013.

**GAMBAR 2**  
**ALUR PENYUSUNAN PJM PRONANGKIS**

Selama berjalannya program, BKM melakukan evaluasi bersama faskel dalam bentuk laporan tinjauan partisipatif, dan Rembug Warga Tahunan. Evaluasi program dimulai dengan melakukan tinjauan partisipatif yang membahas mengenai tiga aspek, yaitu evaluasi kelembagaan, refleksi keuangan, dan evaluasi program. Setelah tinjauan partisipatif, maka evaluasi final akan dituangkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban RWT (Rembug Warga Tahunan) yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban BKM selama 1 tahun, evaluasi program selama 1 tahun, dan rencana program 1 tahun kedepan.



Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2013.

**GAMBAR 3**  
**DIAGRAM PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TANJUNG MAS**

### Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat

#### a. Kelembagaan

Unsur-unsur kelembagaan (Djogo, dkk; 2003) yang telah terdapat dalam BKM Kelurahan Tanjung Mas yaitu institusi, aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dalam bentuk rembug/rakor tiap bulan, kode etik tentang keaktifan BKM, kontrak kerja selama 2 tahun masa bakti, norma atas tingkah laku dalam masyarakat sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, dan struktur pengorganisasian yang jelas. Unsur kelembagaan yang belum ada di BKM Kelurahan Tanjung Mas yakni peraturan dan penegakan aturan atau hukum untuk mewujudkan kegiatan yang ada, dan belum terdapat insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan dari anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.

Kategori perkembangan kelembagaan BKM Kelurahan Tanjung Mas masuk kedalam tahap berdaya berdasarkan kategori pedoman *review* partisipatif PNPM, karena BKM telah

memiliki tujuan, rencana, dan perangkat organisasi serta telah terjadi perubahan sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal masyarakat. Secara umum BKM Kelurahan Tanjung Mas telah memiliki basis yang cukup kuat untuk berkembang namun masih perlu banyak peningkatan kinerja untuk mencapai tahap perkembangan selanjutnya yaitu tahap perkembangan mandiri.

#### b. Kapasitas Masyarakat

- Pengetahuan masyarakat ditunjukkan dari tingkat pendidikannya. Di Kelurahan Tanjung Mas tingkat pendidikan masyarakatnya masih terbilang rendah karena mayoritas masyarakat Kelurahan Tanjung Mas hanya tamat SMA, dan tidak sedikit pula yang hanya tamat SD.
- Kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah ditunjukkan masyarakat dalam pembuatan pemetaan swadaya yang

diadakan di kantung-kantung RT, RW, maupun komunitas.

- Motivasi dalam masyarakat sudah terbentuk karena masyarakat telah memiliki keinginan agar lingkungannya terbebas dari masalah banjir rob namun hal tersebut terhambat masalah ekonomi
- Kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dan fleksibilitas mereka dalam program pemberdayaan masyarakat sudah terbilang baik karena masyarakat sudah aktif dalam memberikan saran dan pendapat
- Kesediaan dan kerelaan masyarakat dituangkan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan materi. Sejauh ini masyarakat telah bersedia untuk melakukan kegiatan program dari PNPM ini dalam pembangunan fisik maupun rembug untuk bertukar pikiran, dan swadaya masyarakat.
- Kohesi sosial masyarakat Kelurahan Tanjung Mas dapat dikatakan baik karena kebersamaan masyarakat cukup kuat yang dituangkan dalam aktivitas sosial dalam bentuk pengajian, perkumpulan komunitas PKK dan karang taruna, dan sebagainya
- Kepemimpinan dalam masyarakat Kelurahan Tanjung Mas ditunjukan dengan adanya pemimpin atau tokoh masyarakat seperti Ketua RT, Ketua RW, kepala kelurahan dan anggota BKM.

#### c. Perencanaan Program

Pemilihan program untuk penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas untuk pembuatan talud di sekitar sungai dan pembangunan saluran drainase sudah mengenai sasaran tinjauan aspek teknis dalam penanggulangan banjir, yakni sungai, dan sistem drainase. Namun pemeliharaan drainase dan sungai masih belum dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Mas karena ditemukan masih banyak sampah menggenang. Sedangkan untuk program peninggian jalan hanya bersifat membangun kembali infrastruktur fisik yang ada bukan untuk penanggulangan, bahkan dapat menimbulkan masalah baru.

Apabila dibandingkan dengan studi kasus Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Tanjung Mas terbilang belum fokus terhadap masalah banjir rob karena di Kelurahan Panggung Lor terdapat pemberdayaan masyarakat yang hanya dikhususkan untuk penanggulangan banjir rob yang bernama P5L yaitu Paguyuban Pengendali dan Penanggulangan Air Pasang Panggung Lor. Sedangkan di Kelurahan Tanjung Mas penanggulangan banjir rob masih digabungkan dengan permasalahan infrastruktur lainnya.

#### Partisipasi Masyarakat

- *Participation in decision making:* diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam pembuatan pemetaan swadaya di kantung-kantung RT, RW, atau komunitas mulai dari identifikasi masalah, prioritas masalah, hingga pengembangan rencana dan program.
- *Participation in implementation:* diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan tenaga, pikiran, dan materi. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk akses lingkungan seperti penanganan banjir rob, masyarakat membentuk kepanitiaan KSM untuk pelaksanaan baik itu peninggian jalan, pembuatan talud, maupun saluran drainase. dalam bentuk materi masyarakat mengeluarkan dana swadaya pembangunan minimal 30% untuk masing-masing program penanggulangan.
- *Participation in benefits:* masyarakat menikmati hasil dari penanggulangan banjir rob yang telah dilakukan namun hanya bersifat sementara waktu, karena air rob akan kembali menggenang karena amblesan tanah dan air pasang yang semakin tinggi.
- *Participation in evaluation:* diwujudkan melalui keterlibatan sebagian masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan BKM dalam evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan yang akan dituangkan dalam laporan tinjauan



partisipatif dan laporan pertanggung jawaban Rembug Warga Tahunan.

### Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dari masing-masing analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas. Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini mengacu kepada beberapa teori-teori mengenai strategi pemberdayaan masyarakat diantaranya pendekatan pemberdayaan. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas berdasarkan pendekatan pemberdayaan oleh Suharto (2010):

1. Pemungkinan : Dalam kasus Tanjung Mas hambatan terdapat pada cara pandang masyarakat yang beranggapan bahwa ruang gerak mereka terikat dengan kondisi ekonomi yang rendah sehingga mereka lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan fisik dasar terlebih dahulu. Maka dari itu pengubahan cara pandang masyarakat perlu dilakukan. Upaya lainnya adalah dengan memperbanyak pengadaan program-program sosial seperti pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.
2. Penguatan : Penguatan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat. Sejauh ini penguatan ini biasanya dilakukan secara insidental apabila terdapat anggaran dana dari PNPM untuk melakukan FGD, padahal proses ini dapat dilakukan dalam kegiatan rembug warga. Penguatan kepada anggota BKM yang diperlukan dalam kasus ini antara lain berwujud penguatan kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengerahkan sumberdaya, dan kemampuan teknis khususnya pada proses transisi peran fasilitator kepada masyarakat dalam hal *channeling* dengan pihak ketiga untuk memperoleh sumber

dana program yang akan dilaksanakan, kemudian penguatan mengenai pemahaman PNPM.

3. Perlindungan : Melindungi masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dari adanya segala jenis diskriminasi dan dominasi yang merugikan mereka. Upaya ini juga untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat
4. Penyokongan : Proses pembimbingan ini diperlukan untuk mempermudah transisi peran fasilitator kepada masyarakat khususnya BKM, agar BKM dapat lebih mandiri dan tidak selalu tergantung kepada pihak-pihak dari PNPM. Pendekatan ini bertujuan untuk membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Pemeliharaan : Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif untuk memberdayakan masyarakat karena pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk berusaha. Pemeliharaan ini dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di dalam masyarakat seperti kapasitas masyarakat dan kapasitas kelembagaan

Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat lainnya diwujudkan dengan mengeliminir faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan, pemeliharaan terhadap faktor-faktor berpengaruh yang telah terdapat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, serta penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan elemen pemberdayaan berdasarkan teori yang ada. Upaya peningkatan akan dijabarkan secara lebih spesifik terhadap masing-masing permasalahan sebagai berikut:

1. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara fasilitator dengan BKM Kelurahan Tanjung Mas dengan cara memperbanyak komunikasi, karena salah satu prinsip pemberdayaan adalah proses kolaboratif

- yang menuntut kedua pihak tersebut untuk bekerjasama sebagai partner.
2. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri masyarakat untuk bergantung terhadap diri sendiri dan menghindari sikap acuh dan pasrah.
  3. Mempersiapkan individu masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu dengan mengorbankan kepentingan pribadi yang diwujudkan dalam tingkat kedermawanan, kemanusiaan individu, pengorbanan personal, kebanggaan masyarakat, saling mendukung, setia, peduli, persahabatan, dan persaudaraan.
  4. Pemberian insentif dalam kelembagaan BKM maupun masyarakat dan penengakan aturan untuk memotivasi tiap-tiap anggotanya dalam meningkatkan kinerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap program yang diadakan. Hal ini mengingat masih kurangnya keaktifan anggota BKM dan partisipasi masyarakat dewasa.
  5. Pemeliharaan kohesi sosial agar lebih mudah dalam mengkoordinasikan masyarakat pada tiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada, serta pemeliharaan faktor-faktor kapasitas masyarakat lainnya yang telah terdapat pada masyarakat Kelurahan Tanjung Mas seperti kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah, kemampuan berinteraksi, dan kepemimpinan.
  6. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tinjauan aspek non-teknis dalam penanggulangan banjir rob dalam lingkup sosial budaya yakni pemahaman terhadap pentingnya drainase, saluran, dan sungai. Selanjutnya pemahaman mengenai kepentingan bersama dalam lingkungan yang lebih luas, penanaman rasa memiliki dengan cara diikutsertakan berperan aktif dalam penanganan pembangunan dalam jalur swadaya, serta peningkatan rasa dan sifat peduli terhadap lingkungan dengan melakukan pemeliharaan pembangunan fisik yang telah dilakukan dalam kegiatan rutin kerja bakti untuk membersihkan saluran dan sungai dari sampah agar aliran air saat debit air meningkat tidak terhambat dan meluap.
  7. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai akar permasalahan yang dapat menimbulkan atau memperparah kondisi banjir rob, baik dari faktor dinamika alam, maupun dampak kegiatan manusia. Hal ini dilakukan supaya perencanaan program selanjutnya lebih tepat sasaran dan menghasilkan solusi yang beragam sesuai dengan situasi masalah dan faktor yang mempengaruhinya.
  8. Pemilihan program yang tepat sasaran sesuai aspek teknis yang biasa diterapkan dalam penanggulangan banjir rob, yaitu mengarah kepada sungai, sistem drainase, dan tata guna lahan.
  9. Memfokuskan permasalahan banjir rob dengan membedakannya dengan permasalahan infrastruktur lingkungan lainnya agar penanganannya lebih spesifik dan dapat menjangkau seluruh kelurahan.

## KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas memiliki serangkaian proses didalamnya. Perencanaan program dalam pemberdayaan dituangkan pada beberapa produk diantaranya pemetaan swadaya, Renta Pronangkis, dan PJM Pronangkis. Pada masing-masing tahapan dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan banjir rob, masyarakat Kelurahan Tanjung Mas terlibat aktif didalamnya, diantaranya pada saat pengambilan keputusan, implementasi, menikmati hasil, dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pemberdayaan disana. Permasalahan tersebut antara lain terdapat pada aspek kelembagaan, kapasitas masyarakat, dan perencanaan program. Dari kondisi tersebut, adapun upaya peningkatan pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program ini adalah dengan penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Peningkatan

pemberdayaan masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan mengeliminir faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan, pemeliharaan terhadap faktor-faktor berpengaruh yang telah terdapat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, dan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

#### REKOMENDASI

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini ditujukan kepada *stakeholders* terkait seperti fasilitator, BKM, Unit-unit pengelolaan, KSM dan masyarakat Kelurahan Tanjung Mas. Bentuk rekomendasi tersebut antara lain penerapan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang telah dikaji serta memfokuskan penanganan permasalahan banjir rob dengan membedakannya dengan permasalahan infrastruktur lainnya supaya penanganannya lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau seluruh wilayah kelurahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, J. et al. 1979. *Rural Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation: A. State-of-the-Arth Paper*. New York: Cornell University.
- DPU, 2008. *Modul Khusus Komunitas: Review Partisipatif*. Jakarta: PNPM Mandiri Perkotaan.
- Djogo, Tony et. all. 2003. *Bahan Ajaran Agroforesti 8: Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforesti*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Dritasto, Achadiat. 2005. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Wilayah dan Kota." *Jurnal ASPI*. Vol 5 (1). Oktober, hal. 4-16.
- Kodoatie, R. J., and Sugiyanto. 2002. *BANJIR: Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Lawson, Louis and Kearns Ade. 2010. "Community Empowerment in the Context of the Glasgow Housing Stock Transfer." *Urban Studies*, Vol.47 (7), January.
- Mattessich, P., Monsey, B., and Roy, C. 1997. *Community Assessment: Community Capacity*. Vancouver: Wilder Research Center.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yoo, Seunghyun., Butler, J., Elias, T.I., Goodman, R.M. 2010. "The 6-Step Model for Community Empowerment: Revisited in Public Housing Communities for Low-Income Senior Citizens." Seoul National University. *SAGE Publications*. Vol. 10 (2). April. Page 263-265.
- Zubaedi. 2007. *WACANA PEMBANGUNAN ALTERNATIF: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar - Ruzz Media.